

OECD Kajian *Open Government*

# Indonesia

**HAL-HAL POKOK**

2016



## APA YANG DIMAKSUD DENGAN KAJIAN OPEN GOVERNMENT OECD?

Kajian *Open Government* OECD mendukung berbagai negara dalam upaya mereka untuk meningkatkan transparansi, keterlibatan, dan akuntabilitas pemerintah yang dapat memulihkan kepercayaan warga negara serta mendorong pertumbuhan inklusif. Kajian ini menyediakan analisa mendalam terhadap kebijakan dan inisiatif *open government*, dengan didampingi oleh rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti berdasarkan praktik baik, serta prinsip-prinsip dan instrumen OECD. Kajian ini juga membantu menanamkan lebih jauh prinsip-prinsip dan praktik-praktik *open government* dalam siklus pembuatan kebijakan serta dalam mengevaluasi dampak dari kebijakan tersebut.

## BAGAIMANA OECD MEMAKNAI OPEN GOVERNMENT?

OECD mendefinisikan *Open Government* sebagai “**transparansi dari tindakan pemerintah, akses terhadap layanan dan informasi dari pemerintah, serta ketanggapan pemerintah terhadap ide-ide baru, permintaan, dan kebutuhan.**”

Kebijakan *Open Government* adalah alat untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokratis dalam sebuah negara untuk memperbaiki pemenuhan kebutuhan rakyat. Kebijakan ini menghasilkan beragam keuntungan bagi dunia usaha dan warga negara, termasuk bagi pemerintahan yang melaksanakan kebijakan tersebut. Contoh kunci dari kebijakan di atas meliputi:

- Memastikan hasil kebijakan yang lebih baik
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan
- Memperbaiki kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan
- Mendorong pengembangan sosio-ekonomi inklusif
- Membina inovasi

## KERANGKA OPEN GOVERNMENT OECD

OECD menggunakan teori berikut ini untuk merumuskan analisa reformasi *Open Government*. Prinsip kebijakan *open government* diubah menjadi hasil kebijakan jangka menengah dan panjang, melalui penggunaan katalisator kebijakan. Teori perubahan ini dirancang untuk beradaptasi sesuai konteks sebuah negara.



## APA TUJUAN DARI BROSUR HIGHLIGHTS?

Brosur *Highlights* menyajikan fakta-fakta kunci dan temuan awal serta rekomendasi dari “Kajian Open Government OECD Indonesia”. Kajian tersebut meliputi bab-bab berikut:

1. **Konteks dan penggerak *open government* di Indonesia**, yang menganalisa kerangka hukum, kelembagaan, kebijakan, dan pelaksanaan bagi *open government* di Indonesia; meliputi informasi tentang pelaku-pelaku utama yang terlibat serta berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pengembangan dan pelaksanaan *open government*.
2. **Pelaksanaan kebijakan *open government* dari Pusat Pemerintahan**, yang memeriksa fungsi kepemimpinan dan koordinasi dari pelaku-pelaku pemerintah pusat yang memandu dan mengkoordinasi kebijakan *open government*, kemudian menganalisa hubungan antara reformasi sektor publik yang sedang berlangsung serta kebijakan *open government*.
3. **Keterlibatan warga negara: dari informasi dan konsultasi sampai keterlibatan aktif**, yang mendiskusikan pengikutsertaan warga negara dalam siklus kebijakan dan merekomendasikan mekanisme untuk memperluas cakupan keterlibatan.
4. ***Open government*, integritas, dan anti-korupsi**, yang menganalisa peran dari inisiatif *open government* dalam strategi-strategi anti-korupsi yang dimiliki negara, serta peran publik dalam kegiatan anti-korupsi.
5. ***Open government*, TIK, dan Data Terbuka**, yang mengkaji kebijakan digital, alat penyampaian layanan daring, inisiatif data terbuka di Indonesia, dan lain-lain, yang mendukung agenda *open government*.
6. **Pengelolaan keuangan publik dengan fokus pada transparansi anggaran**, yang menyediakan tinjauan dari pengadaan data sehubungan dengan anggaran pengeluaran dan keterlibatan publik dalam penyusunan dan pengawasan anggaran.
7. **Inovasi dalam sektor publik**, yang mempelajari bagaimana Indonesia telah mengembangkan pendekatan-pendekatan dan sarana-sarana inovatif yang mendukung prinsip-prinsip *open government* serta pelaksanaan dan dampak dari penyelenggaraan layanan publik.
8. ***Open Government* dan kaitannya dengan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan**, yang menyediakan tinjauan umum mengenai bagaimana *open government* terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs), serta mendiskusikan bagaimana *open government* dapat mendukung proses pencapaian tujuan SDG dan hasil substantif dari pencapaian tujuan-tujuan tersebut, yaitu yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian hasil kebijakan.





# Indonesia

## Pemimpin *open government*

Selama lebih dari 10 tahun terakhir, Indonesia telah mengupayakan kemajuan yang luar biasa dalam mendorong pembuatan kebijakan yang transparan dan inklusif, serta mendorong keterlibatan aktif dari warga negara. Sebagai salah satu pendiri *Open Government Partnership (OGP)* dan anggota terkemuka ASEAN dengan ekonomi terbesar, Indonesia telah menunjukkan ketertarikan untuk memainkan peran utama dalam menyebarkan prinsip-prinsip dan praktik-praktik *open government* (keterbukaan pemerintah) ke seluruh dunia, dengan perhatian utama pada Asia Tenggara.

### ANGGOTA PENDIRI DAN PEMIMPIN *OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP*

Pada September 2011, Pemerintah Indonesia bersama 8 negara lain menandatangani Deklarasi OGP.

- Dengan menandatangani Deklarasi tersebut, Indonesia berkomitmen untuk “mendorong budaya global keterbukaan pemerintah yang memberdayakan dan melayani warga negara, serta mengedepankan cita-cita pemerintah abad 21 yang terbuka dan partisipatif.”
- Pada September 2012, Indonesia dan Inggris menjadi *co-chair* OGP; kemudian sejak 31 Oktober 2013, Indonesia menjadi *lead chair* OGP yang mengkoordinasikan arah OGP selama periode satu tahun.
- Di tahun 2015, Indonesia terpilih kembali menjadi anggota *steering committee* OGP untuk periode tiga tahun.

### DUKUNGAN STRATEGIS INDONESIA BAGI KETERBUKAAN PEMERINTAH (*OPEN GOVERNMENT*)

- Indonesia mendirikan Sekretariat Nasional di tahun 2015 untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan pemerintah (*open government*), yang diisi oleh perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Bappenas, Kantor Staf Presiden,

dan K/L terkait. Sekretariat Nasional akan mendorong dan memfasilitasi interaksi antara kementerian dan lembaga pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta.

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025) Pemerintah Indonesia menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis dan berlandaskan hukum, diantaranya melalui pemantapan kelembagaan demokrasi, penguatan peran masyarakat sipil, dan penegakan hukum secara adil, konsisten, dan tidak diskriminatif.
- Tujuan-tujuan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN III (2015-2019) berupaya membangun pemerintah yang “bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya,” dengan cara mendorong transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan serta meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.
- Indonesia sedang melaksanakan rencana aksi nasional Keterbukaan Pemerintah ketiga untuk tahun 2014-2015, yang dirancang untuk meningkatkan layanan publik; memperbaiki integritas aparat pemerintah; dan mengelola sumber daya publik secara lebih efektif dan transparan.



## Lingkungan yang mendukung keterbukaan pemerintah di Indonesia

**Kerangka kelembagaan dan hukum yang kokoh adalah kunci dari kesuksesan pelaksanaan kebijakan dan inisiatif keterbukaan pemerintah (*Open Government*). Kerangka-kerangka tersebut menjadi landasan kerja sama secara horisontal di seluruh kementerian/lembaga, serta secara vertikal di tingkat pemerintah daerah. Penyusunan kerangka negara saat ini akan memperluas manfaat dari *open government* bagi berbagai lembaga dan pemangku kepentingan.**

### KERANGKA HUKUM BAGI *OPEN GOVERNMENT* DI INDONESIA

*Seperti di banyak negara OECD, prinsip pemerintah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif tertuang dalam Konstitusi. Jaminan tersebut dilengkapi oleh undang-undang lainnya tentang Akses terhadap Informasi, Rencana Pembangunan Nasional, dan anti-korupsi, yang merupakan salah satu langkah pendukung keterbukaan pemerintah di Indonesia.*

- **Undang-Undang Dasar 1945** menyediakan landasan hukum bagi penerapan prinsip-prinsip transparansi dan partisipasi secara umum. Secara khusus, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak warga negara untuk berkomunikasi dengan bebas serta mendapatkan informasi (Pasal 28F); Undang-Undang Dasar 1945 juga mengakui hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat (Pasal 28); serta menetapkan bahwa anggaran negara “harus dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel (Pasal 23-1).”
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin **hak warga negara untuk mendapatkan informasi serta mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien**. Undang-undang ini juga mengharuskan pembentukan kantor *Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi* (PPID) untuk menyimpan, mencatat, dan menyediakan informasi pemerintah kepada publik.
- Instrumen hukum utama yang mendukung **keterlibatan warga negara** adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang berupaya untuk “mengoptimalkan keterlibatan masyarakat.” Undang-Undang ini mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional dan menjelaskan proses masyarakat untuk berpartisipasi secara formal dalam proses pembangunan melalui *Musyawarah Perencanaan Pembangunan*, atau *musrenbang*.
- Dari berbagai mekanisme hukum tentang **anti-korupsi dan integritas**, dua diantaranya adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana yang merupakan landasan berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang berfungsi sebagai undang-undang perlindungan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*).
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara berfungsi sebagai landasan dari **transparansi anggaran**, sementara Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendukung **inovasi di sektor publik** melalui pembentukan “hak untuk berinovasi” secara *de facto*, yang memastikan perlindungan hukum bagi pelaku inovasi di daerah, apabila terjadi kegagalan.



## LEMBAGA PEMERINTAH KUNCI BAGI KETERBUKAAN PEMERINTAH DI INDONESIA

- **Sekretariat Nasional** didirikan tahun 2015 untuk memfasilitasi pelaksanaan komitmen keterbukaan pemerintah (*open government*). Tiga institusi utama yang mengkoordinir Sekretariat Nasional adalah Kementerian Luar Negeri, Bappenas, dan Kantor Staf Presiden. Sekretariat Nasional dirancang untuk mendukung dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan keterbukaan pemerintah, termasuk koordinasi dengan lembaga di tingkat daerah; membangun kapasitas; dan menyediakan penjangkauan dan komunikasi publik. Sekretariat Nasional juga bertugas untuk menyusun Strategi Nasional Keterbukaan Pemerintah (*Open Government*).



### Komposisi Sekretariat Nasional Saat Ini

- **Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)**, bertugas mengkaji, mengkoordinasikan, dan merumuskan kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan nasional yang bersifat sektoral maupun lintas sektor, kerangka ekonomi makro dan infrastruktur. Bappenas, bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, juga membantu menyusun anggaran tahunan.
- **Kantor Staf Presiden**, bertugas memantau pelaksanaan program prioritas nasional, mengkoordinasi komunikasi politik kepresidenan dan mengelola isu-isu strategis.
- **Kementerian Luar Negeri**, bertugas untuk mengkoordinasikan urusan-urusan diplomatik pemerintah yang berkaitan dengan *open government partnership* secara global.
- Kementerian/Lembaga lain yang berperan penting dalam pelaksanaan komitmen keterbukaan pemerintah (*open government*) adalah **Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN)**, yang

membantu Presiden untuk menyusun kebijakan dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan terkait reformasi birokrasi, termasuk diantaranya yang berhubungan dengan pelayanan publik, sumber daya manusia aparatur, dan ketatalaksanaan. **Kementerian Komunikasi dan Informatika**, diantaranya bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan informasi dan komunikasi publik, termasuk pembinaan atas penyelenggaraan PPID.

## LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DAN MASYARAKAT SIPIL

Selain Sekretariat Nasional dan berbagai kementerian yang mendukung komitmen keterbukaan pemerintah (*open government*) di Indonesia secara langsung, terdapat aktor-aktor penting lainnya dalam pelaksanaan inisiatif keterbukaan pemerintah (*open government*), termasuk lembaga negara independen serta organisasi masyarakat sipil. Keduanya memainkan peran ganda, yaitu mendorong reformasi dan mengawasi dari pemerintah.

- **Komisi Informasi**, berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan Pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.
- **Ombudsman Republik Indonesia**, berfungsi mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah baik Pusat maupun daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara serta badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.
- **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**, merupakan lembaga negara yang bertugas untuk melakukan koordinasi dan supervisi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diatur dalam UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen.
- Sebagai dampak dari reformasi demokrasi di tahun 1998, peran penting kelompok masyarakat sipil di Indonesia terus meningkat. **Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)** di Indonesia telah terlibat secara aktif dalam berbagai isu keterbukaan pemerintah (*open government*), sejak masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dimana inisiatif *open government* dikelola oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
- Beberapa OMS di Indonesia yang aktif terlibat dalam isu-isu keterbukaan pemerintah (*open government*) adalah **Transparency International-Indonesia (TII)**, yang mengkaji kebijakan, menyusun dan menguji kinerja *open government* dengan cara menjalankan *Open Government Scorecard*, yaitu sebuah penilaian awal tentang *open government* di Indonesia. Organisasi lain yang terlibat dalam isu-isu *open government* adalah **Kemitraan**, yang berfokus untuk meningkatkan

keterlibatan politik warga negara dalam pemilihan umum; mendorong kapasitas warga negara untuk terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; serta memperbaiki mekanisme pengelolaan pengaduan dan alat-alat pengawasan masyarakat. Kemitraan juga mengembangkan Index Pemerintahan Indonesia, yaitu database pemerintahan komprehensif pertama di Indonesia. OMS lain memiliki fokus lebih langsung pada pembangunan lembaga demokratis dan pengawasan parlemen, diantaranya adalah **Indonesian Parliamentary Centre (IPC)**, yang memiliki keahlian dalam membangun kapasitas parlemen, mendorong reformasi politik untuk peningkatan demokrasi serta akuntabilitas parlemen; dan **Komite Pemantau Legislatif (KOPEL)**, yang mendorong dialog antar badan legislatif dengan masyarakat.

### MENUJU PEMBANGUNAN “NEGARA TERBUKA”

- Secara umum, Indonesia menghadapi **tantangan dalam menerjemahkan komitmen keterbukaan di tingkat daerah**, menerjemahkan tujuan umum menjadi tujuan-tujuan khusus, dan memastikan komitmen dari kementerian/ lembaga terhadap proses keterbukaan. Terlebih lagi, **keikutsertaan cabang legislatif dan yudikatif dalam proses reformasi open government** masih sangat terbatas.
- Tantangan-tantangan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia perlu mencari cara untuk mengembangkan **pendekatan “negara terbuka”** yang akan mengesahkan kerja sama di antara badan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan berbagai tingkat pemerintahan lainnya, dalam isu-isu *open government* untuk mendorong agenda yang lebih menyeluruh dan terintegrasi.
- Untuk mendukung pendekatan ini, pemerintahan pusat juga perlu **menyusun kebijakan nasional tentang keterbukaan pemerintah (open government)** untuk mendukung reformasi dan pengarusutamaan keterbukaan pemerintah (*open government*) serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam reformasi sektor publik saat ini.
- Kajian *Open Government* OECD akan melihat bagaimana Indonesia dapat menanggapi berbagai peluang untuk berkembang, memastikan kelengkapan seluruh inisiatif, dan mengidentifikasi dampak multiganda.





## Pengarahannya dan koordinasi kebijakan serta praktik keterbukaan pemerintah (*open government*): menghubungkan titik-titik

Sebagai salah satu pendiri *Open Government Partnership (OGP)*, Indonesia telah menjadi yang terdepan dalam mendorong agenda internasional tentang keterbukaan pemerintah (*open government*). Di tingkat nasional, *open government* dimasukkan dalam Prioritas Presiden dan dokumen-dokumen kebijakan kunci, sehingga menampilkan keberadaan *open government* di seluruh pemerintahan. Sebagai langkah berikutnya, pemerintah pusat perlu terus mengidentifikasi cara terbaik untuk mendukung inisiatif *open government* di seluruh pemerintahan dan dalam berbagai tingkat pemerintahan daerah melalui cara-cara yang dapat menguatkan semua pihak.

### OPEN GOVERNMENT: PERAN PEMERINTAH PUSAT

Pengalaman dari berbagai negara OECD menunjukkan bahwa terdapat **tiga elemen penting** bagi pelaksanaan agenda *open government* yang dipimpin oleh pemerintah pusat secara efektif dan efisien, yaitu:

- Agar pelaksanaan kebijakan keterbukaan pemerintah (*open government*) berhasil dan berlanjut dalam jangka waktu yang panjang, pemerintah pusat perlu memiliki **mekanisme kelembagaan**, termasuk sumber daya manusia dan keuangan, serta prosedur pengawasan dan evaluasi yang memadai.
- Lembaga-lembaga di pemerintah pusat yang bertanggung jawab terhadap kebijakan keterbukaan pemerintah (*open government*) harus menyediakan **kepemimpinan yang kuat** dan memiliki **kapasitas untuk membangun visi** dalam mengkoordinasikan keseluruhan pemerintahan menuju pencapaian tujuan kebijakan lintas sektor.
- Lembaga-lembaga di pemerintah pusat harus memiliki kemampuan untuk **mengkoordinasi** seluruh pemangku kepentingan dan menyediakan insentif yang dibutuhkan mereka untuk **bekerja sama dengan cabang-cabang kekuasaan lain dan masyarakat sipil**, baik secara horisontal maupun vertikal.

### OECD DEFINISI PUSAT PEMERINTAHAN

OECD mendefinisikan Pusat Pemerintahan (*Centre-of-Government*) sebagai lembaga-lembaga yang menyediakan dukungan dan saran langsung bagi kepala pemerintahan dan kabinet. Secara umum, pusat pemerintahan memiliki tiga peran utama:

- 1) mendukung pengambilan keputusan secara berkualitas oleh kepala pemerintahan;
- 2) koordinasi kebijakan pada seluruh pemerintah; dan
- 3) mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah.

### SUSUNAN PEMERINTAH PUSAT DI INDONESIA

- Selain **tiga institusi pemerintah pusat yang berada dalam Sekretariat Nasional** (Bappenas, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Luar Negeri), **Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN)** serta **Kementerian Keuangan** juga memainkan peranan penting sebagai pelaku di level ini.
- Sejak dorongan demokratisasi terjadi di tahun 1998, Indonesia telah mengidentifikasi prinsip keterbukaan dalam pemerintahan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan negara, yaitu untuk menyediakan akses terhadap layanan publik yang berkualitas. Selain perhatian khusus pemerintah terhadap keterbukaan pemerintah (*open government*), terdapat tiga area reformasi secara umum yang mempengaruhi pelaksanaan reformasi keterbukaan pemerintah (*open government*) di Indonesia, yaitu: **agenda reformasi birokrasi, desentralisasi, dan proses perencanaan strategis**. Tiap area reformasi ini dapat dikaitkan dengan prioritas dan tujuan khusus pemerintah, seperti peningkatan transparansi, konsultasi, serta keterlibatan.
- Secara khusus, dorongan desentralisasi di Indonesia sejak memasuki abad ke-21 telah mengubah struktur administrasi publik, termasuk hubungan negara-warga negara: yang sejalan dengan makin mendekatnya pengambilan keputusan kepada warga negara secara fisik, sehingga kesempatan untuk melakukan konsultasi dan melibatkan warga negara semakin terbuka lebar. Terlebih lagi, proses perencanaan strategis negara, melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Saat ini berada dalam periode 2005-2025) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang dikeluarkan setiap lima tahun (Rencana Pembangunan Jangka Menengah saat ini berada dalam periode 2015-2019), menekankan pentingnya keterlibatan warga negara.



- **Proses perencanaan strategis dan peningkatan perhatian terhadap pengelolaan kinerja** memberikan jalan masuk untuk memperkokoh keikutsertaan agenda keterbukaan pemerintah (*open government*).
- Pembentukan **Sekretariat Nasional** di tahun 2015 juga menjadi contoh upaya Indonesia untuk mengkoordinasikan dan mendukung inisiatif keterbukaan pemerintah (*open government*) di pemerintah pusat. Secara khusus, Sekretariat Nasional akan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan pemerintah, melalui optimalisasi penggunaan data terbuka dan teknologi informasi; mendorong pengembangan kapasitas; menyediakan dukungan pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*); serta melakukan penjangkauan dan komunikasi publik. Sekretariat Nasional juga akan berperan dalam mengkoordinasikan upaya pemerintah daerah untuk melaksanakan keterbukaan pemerintah (*open government*).
- Tantangan yang akan terjadi di masa depan adalah bagaimana cara untuk **mendukung kapasitas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan reformasi keterbukaan pemerintah (*open government*)** sekaligus memastikan agar prioritas pemerintah pusat dapat tercapai. Pelaku pemerintahan pusat akan memainkan peranan penting dalam menerjemahkan keterbukaan pemerintah (*open government*) dan mengelola kerumitan, ukuran serta tingkat kapasitas yang mempengaruhi dinamika pemerintahan dalam berbagai level.
- **Memperbaiki koordinasi baik secara horisontal (antar pemerintahan pusat dan kementerian) dan vertikal (antar pemerintah pusat dan pemerintah tingkat daerah yang terdesentralisasi)** untuk mempertahankan rasa memiliki terhadap inisiatif keterbukaan pemerintah (*open government*) secara umum. Indonesia ditandai oleh tingkat kerumitan yang tinggi ketika menghadapi isu-isu tata laksana pemerintahan, karena ukuran dan struktur tata laksana pemerintahan yang terdesentralisasi. Pemerintah Indonesia perlu mengejar keterlibatan aktif kementerian, lembaga terkait, dan pemerintah daerah dalam keseluruhan siklus kebijakan, serta dalam pengembangan penyediaan insentif bagi aparat pemerintah untuk melaksanakan agenda keterbukaan pemerintah (*open government*).
- **Mengaitkan proses perencanaan inisiatif keterbukaan pemerintah (*open government*) dengan kelanjutan hasil kerja strategis, terutama dengan cara menyediakan sumber daya yang memadai untuk mengawasi dan mengevaluasi hasil kerja tersebut.** Secara khusus, pemerintah pusat perlu memastikan bahwa siklus Rencana Aksi OGP dikaitkan dengan perencanaan dan siklus anggaran nasional, untuk menjamin ketersediaan anggaran bagi kegiatan *open government*, di mana kegiatan tersebut menjadi bagian dari sistem pengawasan nasional.
- **Membangun kapasitas daerah dan mendorong budaya yang mendukung prinsip-prinsip *open government* diantara aparatur sipil negara**, sehingga pemahaman serta dukungan terhadap reformasi keterbukaan pemerintah (*open government*) menjadi fokus sektor publik.

## REKOMENDASI

- **Mempererat hubungan dan integrasi antar berbagai agenda pemerintah yang berbeda, sekaligus upaya saling menguatkan**, termasuk dalam Prioritas Presiden, tujuan Rencana Pembangunan jangka pendek, menengah, panjang; Rencana Aksi OGP, serta berbagai agenda reformasi lainnya seperti peta jalan reformasi birokrasi.





## Sebuah perhatian pada keterlibatan warga negara: dari informasi dan konsultasi sampai ke keterlibatan aktif

**Peran warga negara yang lebih besar dalam membentuk kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya adalah pilar utama keterbukaan pemerintah (open government) dan merupakan tujuan di dalam dokumen perencanaan strategis Indonesia serta di dalam Rencana Aksi OGP. Pembuatan kebijakan dan penyediaan layanan publik yang partisipatif meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah, menyesuaikan tujuan pemerintah dengan kebutuhan warga negara, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik.**

### PENDEKATAN OECD UNTUK MELIBATKAN WARGA NEGARA

OECD mendefinisikan hubungan antar warga negara dengan administrasi publik dalam bentuk meningkatnya keterlibatan warga negara. Secara umum, ketika pemerintah mendorong konsultasi dan keterlibatan publik, mereka akan mendapatkan ide-ide baru serta masukan dari warga negara mengenai kebijakan dan layanan, sehingga meningkatkan kualitas pemerintahan dan kepatuhan warga negara terhadap pemerintah.

- **Penyediaan informasi** adalah hubungan satu arah di mana pemerintah menghasilkan dan menyampaikan informasi untuk digunakan oleh warga negara.
- **Konsultasi** adalah hubungan dua arah di mana warga negara memberikan masukan kepada pemerintah.
- **Keterlibatan aktif** adalah hubungan yang berlandaskan kemitraan dengan pemerintah, di mana warga negara terlibat dalam mendefinisikan proses dan isi dari pembuatan kebijakan.
- Elemen lain dalam keterlibatan warga negara adalah konsep **menghasilkan bersama (co-production)**, yaitu dalam kebijakan dan layanan, di mana warga negara terlibat dalam sebuah kemitraan dengan penyedia jasa profesional ketika merancang dan menyediakan layanan publik.

### PENGATURAN KETERLIBATAN WARGA NEGARA DALAM SIKLUS KEBIJAKAN SAAT INI

- Peran warga negara dan kelompok masyarakat sipil dalam pemerintahan menjadi semakin penting sejak reformasi yang terjadi di tahun 1998. Hal ini terjadi sebagai dampak dari aturan hukum yang mengizinkan **kebebasan** untuk berserikat dan untuk mendapat akses terhadap informasi, termasuk terhadap proses **desentralisasi** di dalam negara.

- **Kerangka hukum** negara, yang dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, termasuk undang-undang, aturan, serta keputusan presiden, menyediakan landasan yang kokoh bagi keterbukaan dan keterlibatan warga negara. Secara keseluruhan, kerangka hukum negara mengakui hak publik untuk terlibat, menjamin akses terhadap informasi, menciptakan mekanisme untuk menyebarkan informasi, dan mendirikan lembaga pemerintah yang independen, serta menciptakan mekanisme akuntabilitas.
- Mekanisme utama untuk **menyebarkan informasi di Indonesia adalah kantor PPID**. Kerangka hukum bagi akses terhadap informasi juga memberikan mekanisme dukungan untuk dijalankan ketika melaksanakan prosedur, membantu menyelesaikan perselisihan akibat permintaan informasi dan memberikan ruang untuk melaporkan pelaksanaan hukum. Pemerintah menyadari pentingnya memperbanyak kantor PPID, karena tanpa kantor-kantor tersebut, tidak akan ada unit pemerintah yang ditunjuk khusus untuk menangani permintaan publik akan informasi.
- **Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) menyediakan jalan utama bagi publik untuk terlibat secara formal dalam kegiatan perencanaan strategis pemerintah**. Walaupun proses musrenbang adalah kesempatan yang penting untuk melibatkan publik dalam menentukan prioritas pembangunan di seluruh tingkatan pemerintah, baik perwakilan pemerintah dan OMS telah menyadari keterbatasan dari musrenbang, terutama dalam memastikan bahwa masukan publik diperhitungkan serta dalam mengidentifikasi mitra OMS yang tepat.
- Salah satu cara Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan **keterlibatan publik untuk mengawasi penyediaan layanan publik adalah melalui LAPOR!**, sebuah wadah daring untuk menangani keluhan, yang diluncurkan pada bulan November 2011.
- Dukungan nyata dari pemerintah untuk meningkatkan hubungan dengan warga negara juga terlihat dari strategi pembangunan, agenda prioritas pemerintah (Nawa Cita), dan dokumen Rencana Aksi OGP.

**REKOMENDASI**

- **Menyusun keseluruhan strategi pemerintah yang lebih terstruktur dan konsisten untuk mendorong keterlibatan warga negara.** Walaupun prioritas ini sudah dimasukkan dalam strategi pembangunan dan rencana keterbukaan pemerintah (*open government*), Indonesia perlu fokus untuk menerjemahkan rencana aksi tersebut menjadi tindakan operasional, termasuk menyusun agenda dan jadwal, menentukan aktor dan lembaga-lembaga yang terlibat, dan lain sebagainya.
- **Mengklarifikasi panduan bagi keterlibatan warga negara.** Menyusun mekanisme yang terstruktur, sistematis, dan transparan bagi keterlibatan warga negara akan memperluas jangkauan keterlibatan. Sebagai contoh, pemerintah dapat mengembangkan Tata Cara Konsultasi Publik untuk menjelaskan peran konsultasi publik dalam proses pembuatan undang-undang, menekankan adanya peluang bagi publik untuk terlibat, dan untuk menyusun mekanisme bagi pemerintah dalam mengkaji bagaimana proses konsultasi dapat mempengaruhi kebijakan.
- **Mendorong budaya keterlibatan warga negara dengan cara memberitakan keluaran serta keberhasilan kepada publik dan aparatur sipil negara.** Berinvestasi pada kapasitas penjangkauan dan komunikasi – yaitu dengan cara menyediakan panduan bagi komunikasi publik serta pelatihan bagi pejabat pemerintah – merupakan hal yang penting untuk mendorong keterlibatan warga negara yang efektif, karena hal tersebut membuat warga negara merasa waktu dan upaya mereka berarti. Pemberitaan yang lebih jelas, terutama tentang keberhasilan pemerintah, juga membantu mengumpulkan dukungan bagi inisiatif keterbukaan pemerintah (*open government*) di seluruh pemerintahan.
- **Mendukung kapasitas organisasi masyarakat sipil untuk terlibat dalam kegiatan tata laksana pemerintahan.** Terlepas dari meningkatnya hubungan antara publik dengan pemerintah di Indonesia, masih terdapat ruang untuk memperbesar peran OMS. Untuk mencapai tujuan ini, Pemerintah Indonesia dapat menyediakan alat dan kesempatan pelatihan bagi perwakilan masyarakat sipil serta kepada publik, dalam upaya mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pemerintah, serta untuk menjamin posisi mereka sebagai mitra dalam penyediaan layanan pemerintah. Pemerintah juga dapat mengidentifikasi peluang untuk melibatkan publik sebagai rekan dalam penyediaan layanan publik.

- **Mendorong akses publik terhadap informasi.** Walaupun kerangka hukum Indonesia mendukung akses terhadap informasi, masih ada hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjamin kebebasan informasi, yaitu dengan menjamin kerahasiaan identitas (*anonymity*) pemohon informasi, dan dengan memperdalam pengetahuan tentang undang-undang kebebasan informasi.
- **Membangun kapasitas negara dalam mengevaluasi dampak dari upaya untuk melibatkan warga negara.** Pembangunan kapasitas meliputi peningkatan pelacakan statistik dan informasi tentang jumlah dan hasil dari konsultasi publik, serta pengumpulan data yang lebih konsisten mengenai interaksi serupa di tingkat daerah. Pemerintah pusat juga dapat memfasilitasi koordinasi antar alat untuk melibatkan warga negara yang sudah ada, dan memperdalam analisa nilai tambah dari konsultasi publik. Perlu diperhatikan, bahwa Pemerintah Indonesia juga harus berfokus pada pembangunan kapasitas pejabat publik dalam mengolah informasi yang diterima ketika konsultasi, seperti dalam musrenbang, dan untuk melaporkan keputusan pemerintah kepada publik.

Sumber: OECD (2001), Warga Negara dan Mitra, diperbaharui dalam OECD (2009), *Perhatian Pada Keterlibatan Warga Negara Dalam Memperbaiki Kebijakan dan Layanan Publik. Studi OECD tentang Keterlibatan Publik*  
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264048874-en>.





## Open government, integritas dan anti-korupsi di Indonesia

**Integritas dan pemberantasan korupsi tetap menjadi isu penting di Indonesia. Walaupun Indonesia telah mengambil langkah berarti untuk mencegah korupsi melalui upaya transparansi dan open government, tantangan yang masih ada adalah bagaimana membentuk budaya integritas dalam sektor publik.**

### PENGATURAN KETERLIBATAN WARGA NEGARA SAAT INI DALAM KEGIATAN ANTI-KORUPSI

**Memberantas semua bentuk korupsi tetap menjadi prioritas di Indonesia**, dan pemerintah berkomitmen untuk membangun budaya integritas, melalui kerja sama dengan pejabat publik di seluruh tingkatan, OMS, serta sektor swasta dan warga negara biasa.

- Dari sudut pandang keterbukaan pemerintah (*open government*), **warga negara memainkan peranan penting dalam mendorong budaya integritas**, pada tiga bidang utama: keterlibatan dalam siklus kebijakan; pengawasan dan akuntabilitas; serta peningkatan kesadaran.
- **Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk bekerja sama dengan warga negara dan OMS** dalam mendorong budaya integritas melalui inisiatif

untuk berkonsultasi di dalam pengembangan kebijakan anti-korupsi, penggunaan masukan dari warga negara dalam mengawasi kemajuan anti-korupsi, dan dengan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran secara terorganisir.

- Selain dari jalur khusus yang dioperasikan KPK bagi pelapor tindak pidana (*whistle-blower*), **terdapat beberapa jalur yang berkontribusi dalam perbaikan sistem pemerintahan dan pemberantasan korupsi** yaitu LAPOR!, Kantor Ombudsman, dan layanan pengaduan dalam kementerian serta di tingkat pemerintah daerah.
- Cara lain bagi warga negara untuk memperkuat tuntutan mereka akan integritas di dalam sektor publik dan masyarakat secara umum adalah melalui peran mereka sebagai pengawas (*watchdog*), yang dibantu oleh kehadiran OMS, media, dan lembaga publik. Selain KPK, lembaga



integritas publik yang terkait adalah dua lembaga audit, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kedua lembaga tersebut perlu memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasannya.

- **Tantangan yang muncul berhubungan dengan kapasitas pengolahan, kemauan untuk mengadopsi perubahan struktural, dan tumpang tindihnya jalur pelaporan.** Semua tantangan ini menambah kendala bagi kapasitas. Ditambah lagi dengan adanya beragam lembaga dan jalur yang terlibat, isu-isu keamanan data dan hak privasi mungkin dengan sendirinya dapat menimbulkan masalah-masalah integritas.

## REKOMENDASI

- **Terus melibatkan OMS sepanjang siklus kebijakan anti-korupsi, termasuk dalam penetapan agenda, proses pengembangan kebijakan dan pengawasan serta kegiatan evaluasi.** Secara khusus, galilah lebih dalam sinergi antara KPK dan OMS dalam pendidikan sipil dan peningkatan kesadaran anti-korupsi. Pemerintah Indonesia juga perlu berupaya untuk memperkuat kerja sama antara warga negara dengan kedua lembaga audit di Indonesia, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK), untuk mendorong budaya integritas.
- **Mengupayakan agar berbagai mekanisme pelaporan dan pengaturan kelembagaan dapat dibuat lebih efektif dan efisien,** dalam menghasilkan perubahan struktural untuk tata laksana pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini membutuhkan penilaian rinci tentang kapasitas pengolahan, analisa kesenjangan, dan hal-hal yang bertumpang tindih, serta pemeriksaan keamanan data dan hak atas privasi pelapor di sepanjang siklus pengajuan pengaduan.
- **Memeriksa efektivitas kerangka hukum dan aturan.** Secara khusus, perlu dikaji pengaturan perlindungan pelapor tindak pidana (*whistle-blower*) dan cara untuk melakukan perbaikan, misalnya dengan mengikutsertakan undang-undang yang mengatur tindakan disipliner; menempatkan beban pembuktian kepada pemberi kerja untuk membuktikan bahwa setiap tindakan yang diambil terhadap pekerja tidak berhubungan dengan pelaporan tindak pidana yang dilakukan; dan sebagainya. Pertimbangkan juga untuk menyusun kerangka peraturan bagi tindakan melobi, yang bertujuan untuk memungkinkan pengawasan publik dan perlindungan siklus kebijakan dari penangkapan.
- **Memperkuat efektivitas sistem penyingkapan aset** untuk pencegahan korupsi dan penuntutan, melalui penetapan prioritas berdasarkan penilaian risiko dan evaluasi kapasitas pengolahan.





## Open government, tik, dan data terbuka

Perubahan yang dihasilkan oleh warga negara yang makin terlibat dan mendapat informasi, serta kemauan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efisiensi sesuai dengan komitmen keterbukaan pemerintah (*open government*), telah mendorong negara untuk meningkatkan upaya-upaya dalam membangun pemerintahan digital.

### REKOMENDASI OECD TENTANG STRATEGI PEMERINTAH DIGITAL

Keterbukaan dan Keterlibatan	Tata Laksana Pemerintahan dan Koordinasi	Kapasitas untuk Mendukung Implementasi
1. Keterbukaan, transparansi, dan inklusivitas  2. Keterlibatan dan partisipasi dalam konteks adanya banyak pelaku dalam pembuatan kebijakan dan penyediaan layanan public  3. Membentuk budaya yang berorientasi pada data  4. Melindungi privasi dan memastikan adanya keamanan	5. Komitmen politik dan kepemimpinan  6. Penggunaan teknologi digital yang koheren di berbagai bidang kebijakan  7. Kerangka organisasi dan tata laksana pemerintahan yang efektif untuk mengoordinasikan  8. Memperkuat kerjasama internasional dengan pemerintah negara lain	9. Pengembangan kasus usaha yang jelas  10. Kapasitas kelembagaan yang diperkokoh  11. Pengadaan teknologi digital  12. Kerangka hukum dan regulasi

Rekomendasi OECD tentang Strategi Pemerintahan Digital, 2014



### PERTIMBANGAN UTAMA

**Transformasi digital yang telah mengubah cara masyarakat bekerja, mengakses informasi, dan membagi data, menyajikan peluang dan tantangan bagi Pemerintah Indonesia.** Konstituen yang makin terlibat dan mendapat informasi menuntut interaksi yang lebih sesuai dan responsif dengan administrasi publik. Mereka juga menuntut kebijakan yang lebih efektif dan kinerja sektor publik yang lebih baik. Di Indonesia, dan juga secara umum di dunia, tekanan anggaran dan upaya untuk mendapat keuntungan dari efisiensi telah mendorong pemerintah dalam memperbaiki dan meningkatkan upaya digitalisasi.

- Pemerintah Indonesia telah sukses menghasilkan **layanan publik secara digital yang mewakili langkah penting dalam rancangan layanan yang lebih berorientasi pada warga negara**, sehingga mendukung peningkatan transparansi dan keterlibatan warga negara. Sebagai contoh, Kementerian Agama mengembangkan SISKOHAT, yaitu sebuah aplikasi inovatif yang membantu warga negara untuk mengawasi status mereka dalam daftar tunggu Haji.
- Pemerintah Indonesia telah mengakui potensi dari **Open Government Data (OGD)** – atau dengan kata lain penyebaran data yang terkumpul dan dihasilkan oleh organisasi publik sambil melakukan tugas atau mengolah data yang ditugaskan dengan menggunakan dana publik – untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, integritas, dan kinerja sektor publik. Portal pusat data terbuka Indonesia, yang dirancang untuk menyediakan akses mudah terhadap rangkaian data, dan untuk memperbaiki transparansi kegiatan sektor publik kunci tercermin sebagai salah satu komitmen negara terhadap OGP.
- Sektor publik di Indonesia semakin tertarik untuk **meningkatkan kreativitas, keterampilan dan ide-ide inovatif di luar sektor publik untuk menyelesaikan masalah** sehingga meringankan beban keuangan otoritas publik. Inisiatif-inisiatif tersebut mengejar pendekatan yang lebih berorientasi pada warga negara dalam mengembangkan solusi dan layanan, dengan menjadikan warga negara sebagai mitra dan memberikan mereka kesempatan untuk menentukan prioritas layanan. Kegiatan tersebut termasuk *hackathons* (sebuah acara yang biasanya diselenggarakan selama beberapa hari, di mana orang-orang bertemu untuk membuat program komputer secara bersama-sama),

terutama di tingkat daerah, yang memberdayakan warga negara dan pembangun untuk mengusulkan solusi-solusi inovatif. Kegiatan sejenis ini juga menyediakan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk berkomunikasi dengan pengguna jasa dan untuk memahami kebutuhan para pengguna dengan lebih baik.

- Inisiatif-inisiatif di atas berfungsi sebagai kantong-kantong kecil inovasi yang **belum dikoordinasi dan belum tercakup dalam mekanisme perluasan. Tingkat operasi sistem informasi antar pemerintah yang belum memadai** juga menghalangi kemampuan sektor publik untuk menyampaikan layanan transaksional dan terpadu.
- Pemerintah Indonesia harus menanggapi **tantangan yang muncul akibat kesenjangan digital** antar daerah dan tingkat pendapatan.

## REKOMENDASI

- Untuk memperoleh manfaat dan efisiensi penuh dari TIK, Indonesia perlu **mengembangkan pendekatan yang koheren terhadap penggunaan teknologi digital di seluruh tingkatan pemerintah**, terlepas dari adanya tingkatan desentralisasi yang signifikan.
- Untuk membuka potensi transformatif teknologi dalam mengubah dinamika pemerintah-masyarakat, **Pemerintah Indonesia perlu berupaya keras untuk mencapai skala inisiatif kunci yang lebih besar.** Wadah untuk berpartisipasi perlu diperluas untuk mencapai jumlah pengguna yang signifikan, sementara inisiatif lainnya dengan potensi pengaruh yang besar perlu diperkuat dan diarusutamakan agar pemerintah mendapatkan manfaat penuh (misalnya LAPOR!, dialog publik, *hackathons*, standar rancangan layanan, dll). Hal tersebut membutuhkan sumber daya tambahan, sehingga rencana perlu dibuat untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan, kerangka aturan – misalnya standar rancangan layanan-, mekanisme koordinasi dan pembelajaran sejawat yang kuat.
- **Penggunaan teknologi digital perlu dipandu oleh kebijakan menyeluruh untuk memastikan kesesuaian strategis di seluruh pemerintahan.** Pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan dengan tujuan kebijakan yang lebih luas – seperti kebijakan tentang keterbukaan pemerintah (*open government*) dan pembangunan berkelanjutan – serta dengan strategi reformasi sektor publik dan rencana aksi. Kebijakan tersebut akan menyediakan insentif yang sesuai untuk menciptakan budaya yang dapat memperkuat penggunaan teknologi dalam rancangan dan penyampaian layanan yang lebih terbuka, inovatif, dan partisipatif. Melibatkan pemangku kepentingan yang berkaitan dalam pengembangan kebijakan pemerintah digital akan membantu memastikan bahwa strategi-strategi yang tersusun mencerminkan berbagai sudut pandang yang berbeda. Hal ini juga akan membantu pembentukan visi bersama dan menyesuaikan tujuan dengan tingkat rasa kepemilikan yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan sehingga membawa dampak.
- Pemerintah perlu merancang **kerangka kelembagaan yang kokoh, yang menyertakan mekanisme koordinasi yang kuat pada tingkatan strategis dan operasional** untuk memastikan kesesuaian dengan ambisi dan mekanisme kelembagaan pemerintah. Pemerintah Indonesia juga akan diuntungkan dengan adanya *Chief Digital Officer*, di bawah *National Chief Information Officer*, yang dapat mendukung perubahan digital, serta membangun pemerintahan digital.
- **Penyusunan Rencana Induk Pemerintahan Elektronik (e-government) Nasional** perlu dilengkapi dengan pembentukan metodologi kasus usaha dan model pengelolaan proyek TIK yang dapat membantu lembaga publik dalam merencanakan dan menyusun investasi TIK dengan lebih baik.
- Pemerintah Indonesia perlu **mengembangkan pendekatan strategis untuk menggunakan jalur alternatif dalam melibatkan masyarakat dan menyampaikan layanan, seperti melalui wadah media sosial dan telepon genggam.** Pendekatan strategis tersebut dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan jangkauan penyampaian layanan ke segmen penduduk yang rentan atau tidak terjangkau di daerah terpencil.
- Pemerintah Indonesia perlu **mengenali data sebagai aset strategis dan mengembangkan kerangka tata laksana pemerintahan, infrastruktur, serta kapasitas kelembagaan untuk mendukung penggunaan data strategis dalam pengambilan keputusan.** Untuk mencegah hilangnya peluang dari ketersediaan data pemerintah dan era digital secara umum, Pemerintah Indonesia perlu menciptakan ekosistem *broadband* yang kuat dengan menyertakan lingkungan yang memungkinkan secara hukum dan aturan, termasuk kondisi pasar yang mendukung layanan berkualitas tinggi.
- Mengupayakan **penyusunan ekosistem data open government yang dinamis**, yang memerlukan penyelesaian tantangan hukum dan aturan beserta keterbatasannya, peningkatan kesadaran dan rasa memiliki, pengembangan kemampuan data di seluruh masyarakat, serta secara aktif melibatkan penghasil, penyedia, dan pengguna data untuk mengidentifikasi *dataset* yang berharga dan mendorong penggunaan kembali, yang dapat menyampaikan nilai sosial, ekonomi, dan tata laksana pemerintahan yang baik.





## Pengelolaan keuangan publik dengan perhatian pada transparansi anggaran dan partisipasi warga negara

**Transparansi anggaran mendorong akses dan keterbukaan tentang bagaimana pemerintah merencanakan, dan menggunakan sumber daya keuangan, dalam proses pengelolaan keuangan publik yang kuat. Oleh karena itu, transparansi anggaran menjadi prinsip pengelolaan keuangan publik yang diterima secara umum selama lebih dari dua dekade terakhir dan menjadi landasan isu-isu pemerintahan publik seperti keterbukaan pemerintah (open government), keterlibatan masyarakat, dan kinerja sektor publik.**

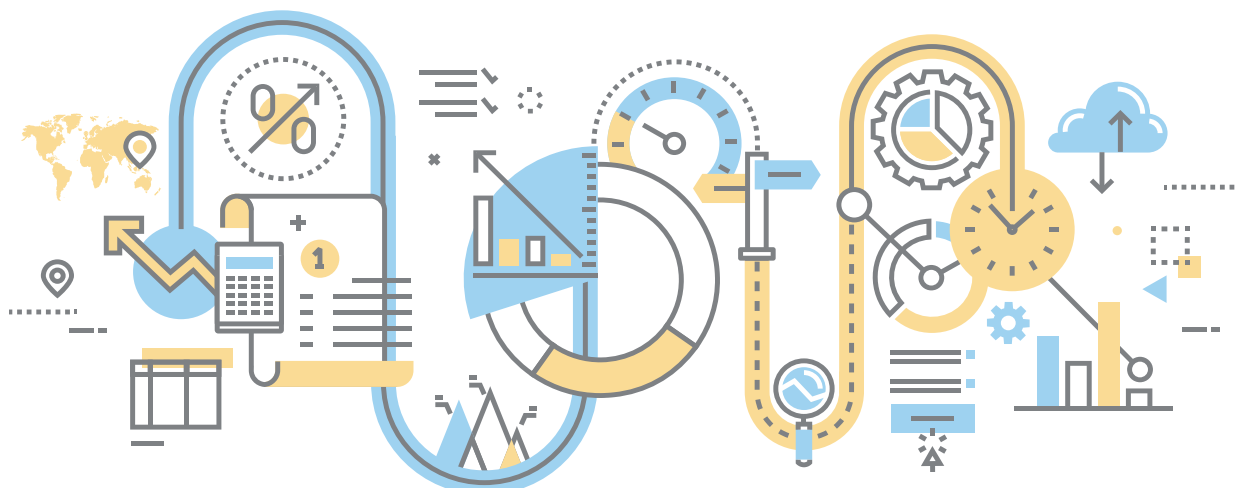
### PRINSIP OECD BAGI PENGANGGARAN YANG TERBUKA, TRANSPARAN, DAN INKLUSIF

Rekomendasi OECD 2015 tentang Pengelolaan Anggaran mengidentifikasi transparansi, keterbukaan, keterlibatan, integritas, dan akuntabilitas sebagai pilar-pilar pengelolaan anggaran modern.

- Dalam hal transparansi, **dokumen anggaran harus bersifat terbuka, transparan, dan dapat diakses**, sementara informasi anggaran perlu ditampilkan dalam format yang dapat dibandingkan pada tiap tahapan kunci dalam proses penganggaran untuk mendorong pengambilan keputusan yang efektif dan akuntabel. Warga negara, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lain harus mampu mengakses laporan anggaran secara penuh dan tepat waktu.
- **Pemerintah juga perlu menawarkan kesempatan bagi publik untuk berpartisipasi dalam proses anggaran** pada tahapan kunci dalam siklus anggaran. Pemangku kepentingan perlu dilibatkan untuk menciptakan debat yang realistis mengenai prioritas kunci, kompromi, biaya peluang, dan nilai ekonomis (*value for money*).

### TRANSPARANSI ANGGARAN DAN KETERLIBATAN WARGA NEGARA DALAM PENGANGGARAN DI INDONESIA

- **Kerangka hukum untuk penganggaran dan pengelolaan keuangan publik** yang terbentuk setelah terjadinya krisis keuangan Asia tahun 1997 dan transisi demokrasi di tahun 1998 terdiri dari undang-undang terkait dengan bidang perencanaan pembangunan, penganggaran, pemerintahan daerah, audit negara, neraca keuangan fiskal, dan keterbukaan informasi publik. Pengesahan undang-undang yang terkait dengan proses anggaran merupakan bagian dari agenda reformasi yang lebih luas, yang telah mengizinkan DPR (parlemen) untuk terlibat lebih jauh dalam penyusunan, pemeriksaan, persetujuan, dan pengawasan anggaran.
- Sementara Kementerian Keuangan menyediakan **akses terhadap data anggaran agregat** di situsnya, lembaga publik lainnya seperti kementerian-kementerian, komite, dan pemerintah daerah, memutuskan secara independen apakah praktik tersebut perlu diikuti; yang mana praktik ini belum bersifat universal. Walaupun demikian, beberapa pemerintah daerah telah mengembangkan inisiatif transparansi yang mungkin dapat menyediakan model ekspansi.
- Pemerintah Indonesia juga telah memadukan **perspektif gender** ke dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan serta memperkenalkan anggaran responsif gender.





## REKOMENDASI

- **Memperbaiki kualitas dan kuantitas data dan informasi yang dapat diakses oleh publik sepanjang siklus anggaran.** Pemerintah Indonesia perlu terus mengupayakan pengembangan solusi berbasis web yang dapat menyediakan data anggaran terbuka mengenai pemerintah pusat dan daerah dengan menggunakan wadah yang terpadu. Pemerintah Indonesia juga perlu memperbaiki akses terhadap informasi melalui proses musrenbang.
- **Memperkuat keterlibatan masyarakat dalam siklus anggaran.** Hal ini dapat berupa peningkatan kerja sama antara Badan Anggaran DPR (parlemen) dengan organisasi masyarakat sipil, misalnya dengan menyediakan kesempatan untuk memberi komentar tentang perkiraan ekonomi; memperbaiki keterlibatan dalam pertemuan musrenbang; memberikan akses publik terhadap proposal anggaran dan rapat lainnya yang berhubungan dengan anggaran di parlemen; serta mengizinkan OMS terpilih untuk memberikan saran.
- **Memperbaiki isi dan jadwal dokumen anggaran,** termasuk *Pre-Budget Statement* (informasi berisikan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menyusun anggaran) dan *Citizens' Budget* (ringkasan yang berisi informasi tentang anggaran sebagai bentuk pelaporan kepada masyarakat). Pemerintah Indonesia juga perlu membuka proses audit bagi keterlibatan masyarakat melalui pelaporan hasil audit secara reguler, serta dengan meminta pendapat pemangku kepentingan tentang kualitas dan dampak dari pengeluaran publik. Hal ini akan menambah kepercayaan diri untuk mencapai integritas dan meningkatkan keberhasilan pengelolaan keuangan publik.
- **Memperkuat pengawasan terhadap pemerintah daerah dengan cara mendorong keterlibatan pemangku kepentingan di daerah.** Hal ini dapat berupa upaya berkelanjutan untuk menerapkan anggaran partisipatif gender dan pendekatan tematis lainnya dalam pengawasan anggaran.
- **Menyediakan pelatihan khusus bagi pejabat dan warga di daerah,** untuk menghasilkan proposal yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah dan melengkapi program pembangunan nasional. Membantu kelompok masyarakat tertentu (seperti orangtua di rumah dan warga dengan disabilitas) yang menghadapi kesulitan untuk menghadiri pertemuan-pertemuan sehingga akan meningkatkan keterwakilan. Memperbaiki akses internet di daerah rural, serta menerapkan solusi berbasis web, juga dapat berkontribusi bagi keterlibatan dan inklusivitas yang lebih mendalam.





## Inovasi di sektor publik

**Dalam melembagakan agenda reformasi, Indonesia berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan organisasi sektor publik agar belajar dari dan meniru praktik baik internasional, sementara dalam waktu yang bersamaan mengembangkan solusi inovatif mereka sendiri. Inovasi adalah alat yang penting untuk mendukung prinsip-prinsip keterbukaan pemerintah (*open government*), meningkatkan dampak dari reformasi kebijakan, dan memperluas jangkauan inisiatif pemerintah.**

### PENGATURAN INOVASI SEKTOR PUBLIK SAAT INI

- **Kerangka hukum yang mendukung inovasi** di Indonesia adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyediakan konteks bagi tindakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memperbaiki fleksibilitas dan transparansi aparatur negara. Selain itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendukung perilaku inovatif melalui pembentukan “hak untuk berinovasi” secara de facto, yang memastikan perlindungan hukum bagi pencipta inovasi di daerah apabila terjadi kegagalan.
- **Dokumen perencanaan strategis negara** juga mendukung inovasi dan keterkaitan dengan keterbukaan pemerintah

(*open government*), terutama melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015-2019), yang menggarisbawahi inovasi publik sebagai alat untuk memperbaiki kualitas layanan publik, dan Rencana Aksi OGP 2014-2015, yang menyadari kontribusi inovasi untuk “membuka potensi Indonesia dalam perekonomian, layanan publik, dan inovasi.” Rencana Aksi OGP juga mencatat secara khusus bahwa salah satu tujuan rencana tersebut, yaitu untuk meningkatkan ketersediaan data terbuka, akan memperbaiki inovasi, di samping memperbaiki layanan publik dan pertumbuhan ekonomi.

- Sementara beberapa inisiatif mengidentifikasi dan mengakui inovasi sektor publik di tingkat pemerintah pusat di Indonesia, upaya-upaya ini tampaknya masih terisolasi. **Belum ada struktur formal untuk memastikan koordinasi inovasi dari perspektif pemerintah pusat.** Secara khusus, Pemerintah Indonesia tidak memiliki sistem insentif



komprehensif yang menyeluruh untuk memotivasi pejabat publik dalam berinovasi; panduan teknis dan prosedur operasional standar yang kurang juga diidentifikasi sebagai penghalang bagi pencipta inovasi di tingkat pemerintah daerah.

- Selain itu, seperti yang terjadi pada banyak negara OECD, **Indonesia tidak memiliki kebijakan pemerintah yang berdiri sendiri untuk mendorong inovasi di sektor publik.**
- Walaupun demikian, Indonesia menunjukkan sejumlah contoh penting dari inovasi sektor publik di tingkat nasional dan daerah, serta inovasi lain yang berfokus pada penyampaian layanan untuk meningkatkan hasil sosial.

## REKOMENDASI

- Inovasi bermunculan di seluruh wilayah Indonesia dan Pemerintah Indonesia mengakui serta memberi penghargaan bagi upaya inovasi. Walaupun demikian, pemerintah belum menerapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa inovasi dapat bertahan, serta belum mengembangkan mekanisme untuk saling berbagi tentang praktik baik di seluruh sektor publik. **Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan untuk mengambil pendekatan yang terkoordinasi dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan terhadap inovasi serta penyebarannya di seluruh sektor publik.** Merincikan visi dan rencana aksi beserta intervensi dapat menciptakan momentum untuk mendukung perubahan agenda dan memastikan komitmen serta dukungan dari lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam penerapannya.

- **Inovasi perlu dibedakan dengan perubahan yang terjadi dalam siklus kebijakan, misalnya dengan mengidentifikasi struktur formal untuk memastikan koordinasi di tingkat pemerintahan pusat.** Indonesia mungkin perlu mempertimbangkan pendekatan kepada koordinasi dan dorongan inovasi yang muncul di negara lain (sebagai contoh keberadaan unit inovasi, komite antar-lembaga, dan strategi inovasi) selagi memeriksa penyesuaian terhadap kompleksitas administrasi pengarusutamaan.
- Indonesia juga perlu merefleksikan pendekatan-pendekatan yang mungkin dilakukan untuk **meniru pengalaman di tingkat daerah ke tingkat nasional**, dengan melihat faktor pendorong perluasan dan potensi manfaat dari penyebaran inisiatif yang berhasil.
- Dalam keseluruhan konteks dari komitmen terhadap reformasi keterbukaan pemerintah (*open government*) serta keanggotaannya dalam OGP, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk **memprioritaskan keikutsertaan praktik-praktik inovatif dalam Rencana Aksi OGP.** Dengan menerapkan hal ini, pemerintah dapat menciptakan momentum besar bagi inisiatif *open government* dalam menambah dorongan inovasi di seluruh sektor publik.





## Open government dan keterkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan 2030

Persetujuan atas Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 pada bulan September 2015 menyediakan kesempatan yang berguna untuk melihat bagaimana prioritas reformasi keterbukaan pemerintah (*open government*) dapat menginformasikan dan membantu mendefinisikan langkah-langkah yang perlu diambil negara untuk menanggapi ambisi global yang diajukan dalam agenda tersebut. Mengaitkan reformasi keterbukaan pemerintah (*open government*) dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang diuraikan dalam Agenda Prioritas 2030 merupakan hal yang relevan bagi Indonesia, karena negara ini memainkan peran pemimpin dalam merancang *Open Government Partnership*.

### TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDG) DAN OPEN GOVERNMENT

- Agenda Pembangunan Berkelanjutan yang terdiri dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dan 169 target penerapan khusus, dimaksudkan agar menjadi agenda yang

komprehensif dan universal di dalam penerapannya. Tujuan-tujuan dan target tersebut akan memainkan peranan besar dalam membentuk prioritas bagi reformasi tata laksana pemerintahan publik di tahun-tahun mendatang.

- Tema-tema luas tentang peningkatan tata laksana pemerintahan dan pengikutsertaan yang ditemukan baik di dalam prinsip *Open Government Partnership* dan SDG menyediakan peluang untuk menghubungkan praktik keterbukaan pemerintah (*open government*) dan pendekatan



untuk mencapai ambisi, yang tercermin dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

- Prinsip, kebijakan, dan praktik *open government* berkontribusi secara langsung kepada **target substantif SDG (terutama melalui Sasaran 16)**.
- Keterbukaan Pemerintah (*Open government*) juga berkontribusi terhadap **proses yang identifikasi, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap semua tujuan dalam SDG**. Secara khusus, prinsip *open government* dapat menginformasikan upaya negara untuk melaksanakan prioritas SDG dengan cara membantu menanggapi berbagai pelaku publik dan swasta; memperkuat transparansi dan akuntabilitas serta memfasilitasi koordinasi secara horisontal di seluruh kementerian dan secara vertikal antar pemerintah pusat dan daerah.
- Pada akhirnya, **menggunakan alat dan strategi yang didapat dari keterbukaan pemerintah (*open government*) akan membantu pemerintah untuk mencapai berbagai target yang dikemukakan oleh SDG**.
- Melalui pendirian **Sekretariat SDG** yang memiliki **hubungan kelembagaan dengan Sekretariat Nasional *Open Government* dan dukungan terhadap Deklarasi Bersama OGP tentang *Open Government* bagi penerapan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030**, Indonesia telah berupaya mengaitkan agenda keterbukaan pemerintah (*open government*) dengan SDG. Hal ini akan membantu pemerintah untuk menyesuaikan dan mengarusutamakan SDG ke dalam rencana pembangunan nasional serta tujuan reformasi pemerintah lainnya.

## REKOMENDASI

- **Melanjutkan penguatan keterkaitan antara inisiatif *open government* (termasuk proses penyusunan Rencana Aksi OGP Nasional) dengan proses perancangan dan penerapan kebijakan untuk mencapai SDG**. Hal ini akan membantu memastikan bahwa penerapan *open government* oleh pemerintah mendukung pencapaian SDG.
- **Mendorong penggunaan data terbuka untuk pelaporan pencapaian SDG**. Hal ini tidak hanya mendukung peran OMS sebagai pengawas (*watchdog*), tetapi juga mendorong penggunaan ulang informasi sektor publik melalui cara yang dapat menghasilkan nilai sosial dan ekonomi.
- **Memastikan mekanisme formal untuk membangun kapasitas dan membagikan pembelajaran** dalam meningkatkan jumlah pejabat yang memahami SDG serta prioritas keterbukaan pemerintah (*open government*) negara.
- **Memastikan OMS dan perwakilan pemerintah memahami bahwa kegiatan keterbukaan pemerintah (*open government*) memainkan peranan dalam merancang strategi SDG nasional, serta dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan kegiatan**. Hal ini bertujuan untuk memastikan keterlibatan warga negara dalam siklus kebijakan di tiap inisiatif yang berhubungan dengan SDG, agar inisiatif tersebut inklusif dan mencerminkan kebutuhan publik.

- Menekankan **wadah dan jaringan OECD yang sudah ada bagi dialog kebijakan**, seperti Jaringan OECD tentang Pemerintah yang Terbuka dan Inovatif di Asia Tenggara, untuk mengidentifikasi praktik baik dan pembelajaran dari anggota OECD serta non-OECD tentang bagaimana mengaitkan agenda *open government* dengan penerapan SDG.





## Direktorat pengembangan wilayah dan tata laksana publik OECD – bidang kerja

**Direktorat Pengelolaan Publik dan Pengembangan Wilayah OECD (OECD Public Governance and Territorial Development Directorate) membantu berbagai negara untuk menerapkan kebijakan strategis, berbasis bukti, dan inovatif untuk memperkuat pengelolaan publik dan meningkatkan kepercayaan warga negara terhadap pemerintah. Bidang kerja yang dijelaskan dalam Kajian Reformasi Open Government di Indonesia menyusun kerja harian Direktorat ini. Pekerjaan ini melibatkan analisa kebijakan dan kajian rekan sejawat, memfasilitasi komite dan jaringan kebijakan, dan menyusun rekomendasi, instrumen, serta prinsip-prinsip.**

### **Open Government dan Keterlibatan Warga Negara**

Melalui Proyek *Open Government*, OECD membantu berbagai negara untuk merancang dan melaksanakan kebijakan *open government*, bekerja sama dengan warga negara, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Untuk menyebarkan pentingnya mengikutsertakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan warga negara dalam reformasi sektor publik di seluruh dunia, OECD telah membentuk Jaringan Regional tentang *Open Government* dan Pemerintah Inovatif di Timur Tengah dan Afrika Utara, Asia Tenggara, dan Amerika Latin, yang mengumpulkan pemimpin *open government* untuk mendiskusikan tantangan bersama serta mengidentifikasi dan menyebarkan praktik-praktik baik. [www.oecd.org/gov/open-government.htm](http://www.oecd.org/gov/open-government.htm)

### **Tata laksana publik bagi pertumbuhan inklusif**

Ketidakmerataan di banyak negara meningkat karena manfaat pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh kelompok masyarakat terkaya. Pertumbuhan Inklusif berkaitan dengan perubahan peraturan agar lebih banyak orang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan ikut merasakan manfaatnya. Pembuatan kebijakan OECD untuk pertumbuhan inklusif menyesuaikan suara, rancangan, penyampaian dan akuntabilitas untuk mencapai hasil bersama. Pada tanggal 28 Oktober 2015, menteri dan pejabat setingkat kabinet dari negara-negara OECD dan non-OECD bertemu di Helsinki, Finlandia, untuk membantu menentukan bagaimana kita dapat membentuk siklus kebijakan agar dapat meningkatkan pertumbuhan dan memperluas pemerataan dalam hasil-hasil sosio-ekonomi. [www.oecd.org/gov/inclusive-growth-and-public-governance.htm](http://www.oecd.org/gov/inclusive-growth-and-public-governance.htm)

### **Pusat Pemerintahan**

Pusat pemerintahan yang meninggalkan peran tradisional dalam melayani eksekutif dari sudut pandang administratif, saat ini memainkan peran yang lebih aktif dalam penyusunan kebijakan. Pekerjaan OECD terkait dengan pusat pemerintahan menggali bagaimana pemerintah dapat menyesuaikan lembaga-lembaga di tingkat pusat agar dapat memainkan peranan yang lebih besar dan berwawasan ke luar tersebut.

Sebagai bagian dari pekerjaan yang terkait dengan pusat pemerintahan, OECD menyelenggarakan rapat tahunan **Jaringan Pejabat Senior dari Pusat Pemerintahan (Network of Senior Officials from Centres of Government)** [www.oecd.org/gov/cog.htm](http://www.oecd.org/gov/cog.htm)

### **Pengawasan dan Evaluasi**

Dalam upaya mendapatkan hasil yang inklusif, berbagai pemerintah sedang meningkatkan penggunaan sistem pengawasan dan evaluasi untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya langka dan memastikan agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang direncanakan. OECD baru-baru ini menyelenggarakan **simposium tentang kinerja sektor publik**. [www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm](http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm)

### **Penganggaran dan Pengeluaran Publik**

Kelompok Kerja Pejabat Anggaran Senior (SBO) menjalankan kajian pemerintah tentang sistem penganggaran. Tujuannya adalah untuk menyediakan kajian komprehensif tentang proses anggaran dalam negara yang diperiksa, untuk mengevaluasi pengalaman nasional terkait dengan praktik terbaik internasional serta untuk menyediakan rekomendasi kebijakan khusus dan untuk menawarkan peluang bagi negara-negara lain untuk memberi komentar tentang masalah-masalah penganggaran spesifik di negara yang sedang diperiksa ("kajian rekan sejawat"). [www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm](http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm)

### **Pengelolaan Sumber Daya Manusia**

Administrasi publik membutuhkan orang yang tepat, di tempat yang tepat, dan pada waktu yang tepat, serta dengan keterampilan yang tepat, apabila mereka ingin memenuhi tantangan zaman ini. Pekerjaan OECD dalam hal pengelolaan tenaga kerja strategis, termasuk kajian pengelolaan sumber daya manusia dalam pemerintah, menekankan upaya pemerintah untuk mendorong perencanaan tenaga kerja strategis. [www.oecd.org/gov/pem/](http://www.oecd.org/gov/pem/)

### Pemerintahan Multi-Tingkatan

Pemerintahan daerah menyediakan layanan publik yang substansial sementara mereka berada dekat dengan warga negara. Dengan demikian, pemerintahan multi-tingkatan yang efektif memainkan peranan penting dalam membawa hasil dari pertumbuhan inklusif. OECD menerbitkan kajian wilayah pada tingkat nasional, regional, dan metropolitan, serta mendorong praktik baik di bidang pengelolaan investasi publik dalam berbagai tingkatan.

[www.oecd.org/gov/regional-policy/multi-levelgovernance.htm](http://www.oecd.org/gov/regional-policy/multi-levelgovernance.htm)

### Pembangunan Regional

Pembangunan regional membantu berbagai pemerintah untuk mendorong kawasan-kawasan yang dinamis kompetitif untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

[www.oecd.org/gov/regional-policy/](http://www.oecd.org/gov/regional-policy/)

### Kebijakan Pengaturan

Peraturan yang lebih baik membantu pemerintah mencapai tujuan kebijakan melalui penggunaan aturan, undang-undang, dan instrumen pengaturan lainnya.

[www.oecd.org/gov/regulatory-policy/](http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/)

### Pemerintahan Digital

Pemerintahan digital menggali bagaimana pemerintah dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta data pemerintah dengan sebaik-baiknya – termasuk data *open government* – untuk merangkul prinsip pemerintahan yang baik dan mencapai tujuan kebijakan.

[www.oecd.org/gov/public-innovation/](http://www.oecd.org/gov/public-innovation/)

### Integritas dan Anti-Korupsi

Integritas adalah hal yang penting untuk membangun lembaga-lembaga kuat yang kebal terhadap korupsi. OECD menyusun serangkaian rekomendasi untuk meningkatkan integritas dan mencegah korupsi di sektor publik serta

memastikan penggunaan pengadaan publik secara strategis. OECD melakukan kajian tentang integritas sektor publik dan pengadaan publik untuk membantu pembuat kebijakan dalam memperbaiki kebijakan, mengadopsi praktik baik, dan menerapkan prinsip serta standar yang telah tersusun.

[www.oecd.org/gov/ethics/](http://www.oecd.org/gov/ethics/)

### BIDANG PEKERJAAN LAINNYA

**Selayang Pandang Pemerintah**, yang saat ini merupakan edisi keempat, terdiri dari indikator-indikator kunci untuk membantu menganalisa perbandingan internasional kinerja sektor publik.

[www.oecd.org/gov/govatag glance.htm](http://www.oecd.org/gov/govatag glance.htm)

**Inovasi Sektor Publik** – pemerintah menemukan cara baru dalam beroperasi dan menanggapi kebutuhan publik dalam dunia yang mengglocal dan saling terhubung, yang ditandai oleh peningkatan harapan warga negara serta kendala keuangan. Upaya ini didukung melalui Observasi OECD terhadap Inovasi Sektor Publik OECD (OECD *Observatory of Public Sector Innovation*).

[www.oecd.org/governance/observatory-public-sectorinnovation/](http://www.oecd.org/governance/observatory-public-sectorinnovation/)

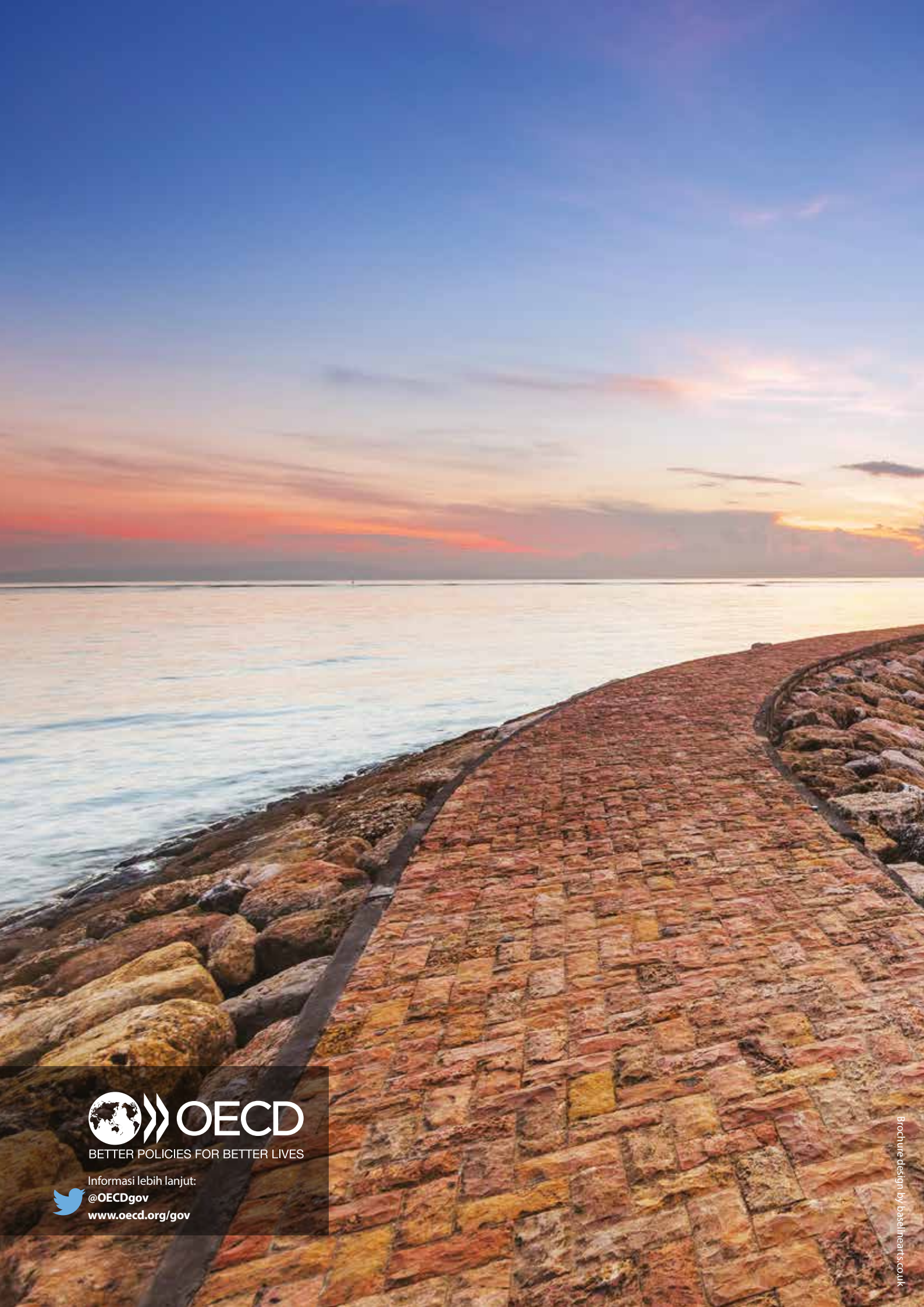
**Gender** – memberdayakan dan mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam ranah publik merupakan hal yang penting untuk memastikan sudut pandang yang seimbang dalam pembuatan kebijakan serta diasosiasikan dengan peningkatan hasil sosial.

[www.oecd.org/gov/women-in-government.htm](http://www.oecd.org/gov/women-in-government.htm)

**Keadilan** – pekerjaan OECD dalam memberikan layanan keadilan bertujuan untuk mendukung peningkatan akses warga negara terhadap keadilan dengan cara memperkuat focus warga pada layanan peradilan.

[www.oecd.org/gov/oecd-expert-roundtable-equal-access-to-justice.htm](http://www.oecd.org/gov/oecd-expert-roundtable-equal-access-to-justice.htm)





**OECD**

BETTER POLICIES FOR BETTER LIVES

Informasi lebih lanjut:



@OECDgov

[www.oecd.org/gov](http://www.oecd.org/gov)